

SKRIPSI

DIAH KUMALASARI

ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN TRAYEK MOBIL PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DI WILAYAH KOTA SURABAYA

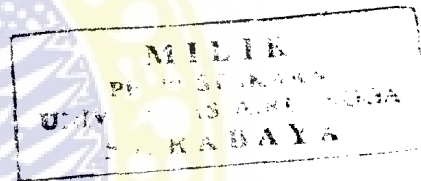


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN TRAYEK
MOBIL PENUMPANG UMUM (MIKROLET)
DI WILAYAH KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Dosen Pembimbing,

EMANUEL SUDJATMOKO, S.H., MS.

NIP. 131 125 987

Penyusun,

DIAH KUMALASARI

NIM. 039614382

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Beranjak dari uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlunya perizinan angkutan sebagai salah satu fungsi pengaturan seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, adalah untuk mencapai kebijaksanaan tertentu dibidang angkutan jalan yaitu untuk pengendalian, terutama mengatur keseimbangan antara kebutuhan dan permintaan jasa angkutan. Adapun pelaksanaan pemberian perizinan di bidang angkutan selain dengan prinsip dekonsentrasi juga menganut sistem desentralisasi. Untuk pemberian izin trayek didesentralisasikan sebagai konsekuensi pemberian otonomi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya kepada Kepala Daerah Provinsi maupun Daerah Kota. Dalam pelaksanaan trayeknya masih banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pengemudi mikrolet yakni dengan melanggar jalur trayeknya. Dengan kata lain pelanggaran itu dilakukan dengan cara melayani jalur trayek di luar jalur yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Namun demikian, sampai saat ini terhadap pelanggaran peraturan perizinan ini belum terlihat adanya tindakan yang diberlakukan oleh instansi pemberi izin, dalam hal ini Dinas LLAJ.

2. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya bagi para pengemudi angkutan penumpang umum (mikrolet), oleh pembentuk undang-undang telah disediakan jalur untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat dikeluarkannya kebijakan Pemda mengenai izin trayek ini, baik melalui jalur non litigasi maupun melalui jalur litigasi.

4.2. Saran

- Sebelum kebijaksanaan penambahan armada dan perubahan jalur dilakukan, perlu dilakukan pengamatan lapangan yang lebih teliti dan data yang lengkap untuk mengetahui penyebab kenaikan faktor muatan yang tinggi dan masalah lainnya. Dengan demikian kebijaksanaan yang diambil dapat tepat mengenai sasaran.
- Perlunya pengaturan kembali kebijaksanaan Pemerintah daerah mengenai perizinan angkutan, agar birokrasi perizinannya tidaklah berbelit-belit yang nantinya tidak akan mempersulit pihak pemohon untuk memperoleh keputusan atas permohonan izinnya, sehingga tidak akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa.
- Dalam pemberian keputusan tentang izin trayek angkutan penumpang umum dalam kota (mikrolet) hendaknya Pemerintah daerah sebelumnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan, misalnya adanya penambahan armada di suatu trayek lyn tertentu, umumnya yang mengisi kesempatan ikut berusaha dalam angkutan penumpang umum (mikrolet) ini di lyn mikrolet yang memperoleh rekomendasi penambahan

armada adalah dari pihak dalam lyn tersebut saja, tanpa memberikan kesempatan pada warga masyarakat diluar komunitas lyn tersebut. Oleh karena kurang tahunya warga masyarakat atas adanya rekomendasi penambahan armada tersebut. Hal ini disebabkan Pemda jarang sekali atau tidak pernah mengadakan pengumuman kepada masyarakat untuk dimintai peran sertanya.

